

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Keamanan dalam Negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus-menerus usaha-usaha dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat, disamping usaha pengembangan ilmu pengetahuan meliputi penelitian, pengembangan dan pengajaran sehingga perlu dijamin melalui kegiatan produksi dan impor.

Pembangunan kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi penduduk agar dapat menunjukkan derajat kesehatan yang optimal, yang dilakukan melalui berbagai upaya kesehatan, diantaranya pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Meskipun narkotika sangat diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun bila disalahgunakan atau digunakan tidak dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang merugikan perorangan atau masyarakat, bahkan dapat

menimbulkan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan dan nilai - nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan melemahkan ketahanan sosial.<sup>1</sup>

Pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, tetapi bagaimana bila pihak yang diberi kewenangan serta kepercayaan untuk menjaga keamanan dan ketertiban tersebut terlibat dalam penyalagunaan narkoba.

Ancaman bahaya narkoba di Indonesia saat ini semakin memprihatinkan karena para penyalagunaan narkoba bukan saja berasal dari masyarakat biasanya melainkan disalahgunakan juga oleh anggota kepolisian. Pada akhir-akhir ini banyak berita di media massa yang memuat tentang tindak pidana menyalagunaan narkoba yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia seharusnya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat serta mencegah dan memerangi peredaran narkoba. Penyalagunaan narkoba merupakan masalah yang sangat kompleks, yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidisipliner, multisektor dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten. Meskipun dalam Kedokteran sebagian besar golongan narkoba masih bermanfaat bagi pengobatan namun bila disalahgunakan atau digunakan tidak menurut indikasi

---

<sup>1</sup>Luthfi Baraza, 2001, *Gangguan mental dan perilaku akibat Narkoba*, Makalah Seminar Narkoba, SMK IPTEK, Jakarta, 20 Agustus 2001

medis atau standar pengobatan, terlebih lagi bila disertai peredaran di jalur ilegal, akan berakibat sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat luas khususnya generasi muda.

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka para penegak hukum khususnya anggota kepolisian yang telah diberikan kewenangan serta kepercayaan oleh masyarakat yang seharusnya menjaga keamanan dan ketertiban harus lebih di perjelas dan dipertegas konsekuensi dari penyalagunaan narkoba bagi anggota kepolisian yang terbukti telah menyalagunakan barang tersebut mengingat dampak dari narkoba yang sangat sulit dipulihkan atau disembuhkan.

Narkoba sangat merugikan karena menimbulkan ketergantungan apabila disalah-gunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama, di sisi lain berdasarkan Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang telah menegaskan bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan narkoba tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dianggap sebagai tindak pidana.

Narkoba sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan nasional Indonesia bahwa tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih,

didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sampai ketinggian yang sangat mengkhawatirkan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa 50% penghuni Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) disebabkan oleh kasus penyalagunaan narkoba. Korbannya meluas kesemua lapisan masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, artis, ibu rumah tangga, pedagang, supir angkot, anak jalanan, pejabat dan bahkan kalangan anggota kepolisian yang seharusnya mencegah peredaran narkoba serta memberantas barang tersebut pun turut terlibat dalam menyalagunakan narkoba. Hal ini menunjukkan penegak hukum tidak memberikan contoh baik bagi masyarakat atau bisa dikatakan kemerosotan moral yang terjadi di kalangan anggota kepolisian sehingga menyebabkan terjadinya penyalagunaan tersebut.

Penyalagunaan narkoba dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa selain kerugian ekonomi, penyalahgunaan narkoba juga berdampak pada kehidupan sosial budaya penggunanya, antara lain sulit mendapatkan pekerjaan, kemiskinan, kemelaratan, keresahan dalam berinteraksi dengan masyarakat, dan perubahan tatanan sosial sehingga tujuan negara untuk mensejahterakan rakyat akan sulit di capai.

Beranjak dari latar belakang masalah di atas maka, berdasarkan Undang–Undang No. 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang narkoba yang merupakan sarana untuk mencegah dan memberantas penyalagunaan narkoba, namun dalam

kenyataan tindak pidana narkoba masih banyak dilakukan oleh anggota kepolisian. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian hukum dengan judul, "**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA MENGGUNAKAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN DENGAN UNDANG UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA,**" untuk melihat apakah ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dapat menanggulangi tindak pidana menggunakan narkoba oleh anggota kepolisian.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang diambil adalah bagaimana upaya penanggulangan terhadap tindak pidana menggunakan narkoba yang dilakukan oleh anggota kepolisian ?

#### **C. Tujuan**

Untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap tindak pidana menggunakan narkoba yang dilakukan anggota kepolisian.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Mahasiswa :
  - a. Untuk memperdalam pengetahuan mahasiswa di bidang Hukum Pidana khususnya mengenai penanggulangan tindak pidana

menggunakan narkoba oleh anggota kepolisian dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan sumbangan pikiran mengenai penanggulangan tindak pidana menggunakan narkoba oleh anggota kepolisian dengan Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

2. Bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia :

Memberikan kesadaran bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia agar dapat menjadi akar dan pedoman yang menopang bentuk perilaku ideal yang kokoh dari polisi dalam melaksanakan pengabdian maka akan membuat mereka tangguh dalam pendiriannya, sehingga dapat mengambil sikap yang tepat dalam setiap tindakannya. Dimana sikap tersebut berpangkal dari integritas yang mendalam dari sanubari dan hati nuraninya itulah dasar moralitas etika kepolisaian yang bersifat hakiki.

3. Bagi masyarakat :

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang bahaya narkoba yang dikonsumsi secara berlebihan dan akibat yang timbul dari penyalagunaan tersebut. Di sisi lain masyarakat juga dapat terlibat aktif dalam melakukan pengawasan dan pencegahan beredarnya narkoba dalam masyarakat, khususnya di lingkungan kepolisian.

### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini benar-benar disusun oleh penulis sendiri dan bukan hasil duplikasi ataupun plagiasi dari hasil penelitian orang lain. Berbeda dengan penelitian terdahulu. Penelitian ini lebih memfokuskan pada Penanggulangan Tindak Pidana Menggunakan Narkotika oleh Anggota Kepolisian dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Se jauh yang penulis ketahui belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila ada penelitian yang sama maka penelitian penulis ini merupakan pelengkap atau pembaharuan. Ada beberapa penelitian terdahulu antaralain,

1. Nama : Ririn Otharini

NPM : 06 05 09360

Judul : Penetapan dan pelaksanaan Rehabilitasi bagi Pencandu Narkotika berdasarkan putusan pengadilan Negeri Yogyakarta.

Penelitian ini lebih menekankan pada Penetapan dan pelaksanaan Rehabilitasi bagi Pencandu Narkotika berdasarkan putusan pengadilan Negeri Yogyakarta.

Tujuan Penelitian :

- a. Untuk mengetahui dan mengkaji kriteria yang dipergunakan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk menetapkan seseorang sebagai pecandu narkotika harus menjalani rehabilitasi.
- b. Untuk mengetahui dan mengkaji rehabilitasi bagi pecandu narkotika yang sudah mendapatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Hasil Penelitian dari penelitian skripsi ini sebagai berikut :

1) Bahwa kriteria yang digunakan Hakim untuk menetapkan seseorang pecandu narkoba harus menjalani rehabilitasi di panti rehabilitasi ditujuk sebagai berikut :

- a. Ada keterangan dari Dokter ahli yang menerangkan bahwa terdakwa harus menjalani rehabilitasi , baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.
- b. Status terdakwa harus sebagai pemakai atau pecandu narkoba yang kecanduan.
- c. Terdakwa tersebut dalam keadaan sakit akibat kecanduan yang apabila tidak segera dilakukan pengobatan atau perawatan melalui fasilitas reehabilitasi akan membahayakan sendiri diri si pecandu

2) Berdasarkan data dari Pengadilan Negeri Yogyakarta terdapat dua kasus tindak pidana narkoba pada tahun 2005 dan 2006 yang diputus Hakim harus menjalani rehabilitasi di panti rehabilitasi.

2.Nama :Wahyu Suryo Novasari

NPM : 04 05 08661

Judul :Peredaran Narkoba di Lembaga Per masyarakatan dan Upaya Penanggulangnya.

Penelitian ini lebih menekankan pada penyebab Peredaran Narkoba di Lembaga Per masyarakatan dan bagaimana Upaya Penanggulangnya.

Tujuan penelitian :



- a. Untuk mendapatkan data-data yang di perlukan dalam menunjang penulisan hukum skripsi.
- b. Untuk mengetahui seberapa luas jalur peredaran narkoba yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan.

Hasil Penelitian :

1. Adanya yang menjadi penyebab pokok peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan sebagai berikut :
  - a) Belum adanya pemisahan ruang antara pengedar dengan pemakai yang ada di LAPAS.
  - b) Kurangnya pengawasan dan pemeriksaan terhadap para pembesuk atau pengunjung.
  - c) Adanya kerjasama antara petugas dengan warga binaan Pemasyarakatan dalam peredaran narkoba di LAPAS.
2. Sebagai upaya penanggulangan peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan maka ada upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan antara lain :
  - a) Meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengunjung atau pembesuk meskipun terhadap anggota keluarga sendiri.
  - b) Dilakukan *steril aread*an pembinaan dilakukan secara insentif lagi untuk mengurangi pola pikir dari para pemakai maupun pengedar mengkonsumsi atau mengedarkan lagi.

3. Nama :Gergahanung Ramadhany

NPM :0405 08871

**Judul :** Perlindungan anak dalam proses perkara penyalagunaan Narkotika

Penelitian ini menekankan pada upaya – upaya Perlindungan anak dalam proses perkara penyalagunaan Narkotika

**Tujuan Penelitian :**

Adapun tujuan penelitian yang dicapai oleh penulis yaitu : untuk memperoleh data dan peran penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap anak dalam perkara penyalagunaan narkotika.

**Hasil Penelitian :**

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh penegak hukum terhadap anak dalam proses perkara penyalagunaan narkotika yaitu :Perlindungan yang diberikan di tingkat kepolisian sama dengan tindak pidana pada umumnya.

Berbeda dengan penelitian terdahulu. Penelitian ini lebih memfokuskan pada Penanggulangan Tindak Pidana Menggunakan Narkotika yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian dengan Undang–undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sejauh yang penulis ketahui belum pernah ditulis oleh orang lain.Apabila ada penelitian yang sama, maka penelitian penulis ini merupakan pelengkap atau perbaharuan.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Pengertian Penanggulangan.**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara,perbuatan menanggulangi, atau suatu cara untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi.

## 2. Pengertian Tindak Pidana.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan terhadap perbuatan tersebut diancam dengan sanksi.

## 3. Pengertian Narkotika.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 butir 1, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

## 4. Pengertian Anggota Kepolisian.

Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) yaitu Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **G. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum dengan abstraksi melalui proses deduksi dari norma hukum positif terhadap permasalahan menyangkut dengan sistematisasi hukum dan menilai hukum positif terhadap permasalahan menyangkut dengan penelitian ini lebih memfokuskan pada Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh

Anggota Kepolisian dengan Undang–Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

### 1. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder . Adapun data sekunder meliputi :

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif Indonesia yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bahan hukum yang berhubungan dengan dengan obyek penelitian yang bersifat mengikat, antara lain :
  - 1) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G ayat (1), Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
  - 2) Undang–Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - 3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang diperoleh dari buku–buku, karya ilmiah,laporan penelitian, majalah dan *website* yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

## **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah dilakukan di POLDA DIY dan POLRESTA Yogyakarta.

## **3. Metode Pengumpulan Data**

### **a. Wawancara.**

Adalah melakukan tanya-jawab dengan narasumber untuk memperoleh data mengenai permasalahan yang diteliti, dimana pertanyaan telah disusun dengan mengambil pokok-pokoknya saja sehingga data yang diperoleh benar-benar berkaitan dengan obyek yang diteliti.

### **b. Studi Pustaka**

Studi kepustakaan dilakukan untuk menunjang penelitian lapangan yaitu dengan cara membaca, mempelajari, memahami, peraturan perundang-undangan, naskah-naskah, buku-buku serta pendapat yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang diteliti.

## **4. Analisis Data**

Dalam menganalisis data dan mengambil kesimpulan penelitian, peneliti menggunakan penalaran secara deduktif. Metode deduktif yaitu pola yang menarik kesimpulan dari pengetahuan yang bersifat umum yang digunakan untuk menilai suatu kejadian yang bersifat khusus atau bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (ketahui/aksiomatik) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.